

**PPS USAI, BAGAIMANA HASILNYA?**

Jakarta, 1 Juli 2022 – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) resmi berakhir tadi malam pukul 24.00 WIB. Lantas, bagaimana realisasi penerimaan PPS? Apakah sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah? Setelah ini, apa kelanjutannya?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara khusus melaksanakan Konferensi Pers Program Pengungkapan Sukarela untuk menjawabnya. Konferensi Pers dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo serta didampingi oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Aرسال, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufansa Wira Sakti, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Iwan Djuniardi, dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP hari ini pukul 16.00 WIB.

Realisasi penerimaan PPS meningkat sangat signifikan di akhir masa program. Sampai dengan akhir periode, realisasi penerimaan PPS disampaikan sebagaimana berikut ini:

Rekapitulasi data kepesertaan

- Total jumlah peserta ada 247.918 wajib pajak (WP), yang terbagi menjadi 82.456 surat keterangan dari kebijakan I dan 225.603 surat keterangan dari kebijakan II. Sebagai catatan bahwa satu WP dapat mengikuti dua kebijakan sekaligus dan dapat mengikuti PPS lebih dari satu kali.
- Rincian kepesertaan per jenis WP sebagai berikut:

	Kebijakan I		Kebijakan II (hanya OP)
	Badan	OP	
Surat Keterangan	4067 WP	78.389 WP	225.603 WP
PPh	Rp1,53 T	Rp31,38 T	Rp28,10 T
Harta Bersih	Rp19,09 T	Rp380,52 T	Rp195,21 T
Deklarasi DN & Repatriasi	Rp17,17 T	Rp327,43 T	Rp167,97 T
Investasi DN & Repatriasi	Rp1,15 T	Rp15,11 T	Rp6,10 T
Deklarasi LN	Rp0,77 T	Rp37,98 T	Rp21,16 T



- Nilai harta bersih yang diungkapkan sebesar Rp594,82 triliun.
- Jumlah PPh yang disetorkan sebesar Rp61,01 triliun, terdiri dari Rp32,91 triliun kebijakan I dan Rp28,1 triliun untuk kebijakan II.
- Nilai harta bersih dari deklarasi dalam negeri sebesar Rp498,88 triliun. Dan nilai harta bersih dari repatriasi sebesar Rp13,70 triliun.
- Nilai harta bersih dari deklarasi luar negeri sebesar Rp59,91 triliun.
- Nilai harta bersih dengan komitmen investasi sebesar Rp22,34 triliun.

Lapisan jumlah WP berdasarkan harta bersih yang diungkap

- Rentang 0 s.d 10 juta rupiah sebanyak 38.870 WP (15,68%).
- Rentang >10 juta s.d 100 juta rupiah sebanyak 82.747 WP (33,38%)
- Rentang >100 juta s.d 1 miliar rupiah sebanyak 75.110 WP (30,30%)
- Rentang >1 s.d 10 miliar rupiah sebanyak 41.239 WP (16,63%)
- Rentang >10 s.d 100 miliar rupiah sebanyak 9.263 WP (3,73%)
- Rentang >100 miliar s.d 1 triliun rupiah sebanyak 705 WP (0,28%)
- Di atas 1 triliun rupiah sebanyak 11 WP (0,00%)

Negara asal harta deklarasi dan repatriasi harta bersih

No	NAMA NEGARA	PESERTA	NILAI HARTA	NILAI PPH TOTAL
1	Singapura	7997	56.960,11	7.295,14
2	Virgin Britania Raya, Kepulauan	50	4.977,39	601,90
3	Hong Kong	432	3.580,77	440,71
4	Australia	1154	2.766,32	372,14
5	Tiongkok, Republik Rakyat	332	1.512,37	180,63
6	Malaysia	422	1.184,18	162,24
7	Amerika Serikat	399	1.272,80	160,39
8	India	141	417,47	59,01
9	Swiss	45	342,74	49,10
10	Britania Raya	120	357,79	42,48
11	Virgin Amerika Serikat, Kepulauan	3	326,21	29,04
12	Kanada	63	177,12	26,70
13	Cayman, Kepulauan	135	147,05	24,19
14	Filipina	16	164,26	22,97
15	Uni Emirat Arab	26	121,46	18,97

**Statistik berdasarkan nilai harta bersih**

- Lima besar jenis harta adalah uang tunai sebesar Rp263,15 triliun, harta setara kas lainnya sebesar Rp75,43 triliun, tabungan sebesar Rp59,97 triliun, deposito sebesar Rp36,44 triliun, dan tanah/bangunan sebesar Rp26,35 triliun.
- Lima besar jenis usaha adalah pengusaha/pegawai swasta sebesar Rp300,04 triliun, jasa perorangan lainnya sebesar Rp59,16 triliun, perdagangan eceran sebesar Rp13,66 triliun, pegawai negeri sipil sebesar Rp9,72 triliun, dan real estate sebesar Rp9,48 triliun.
- Lima besar kinerja Kantor Pelayanan Pajak adalah Wajib Pajak Besar Empat sebesar Rp12,93 triliun, Pratama Jakarta Pluit sebesar Rp6,57 triliun, Pratama Surabaya Mulyorejo sebesar Rp5,38 triliun, Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebesar Rp4,97 triliun, dan Pratama Jakarta Kembangan sebesar Rp4,48 triliun.

Penempatan dana investasi PPS di Surat Berharga Negara (SBN)

- Sampai dengan hari ini, sudah ada penempatan dana investasi PPS pada Surat Utang Negara (SUN) seri FR0094 sebesar Rp1,06 triliun dan pada SUN seri USDFR0003 sebesar USD11,84 juta (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu dolar Amerika). Dengan dealer utama SUN yaitu BCA, Bank Mandiri, Maybank, Bank Panin, BRI, BNI, OCBC, NISP, dan Bank Danamon.
- Penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri PBS035 sebesar Rp135,35 miliar dengan dealer utama Bank Mandiri, Bank Panin, BCA, Maybank, BRI, dan BNI.
- Investasi dana PPS masih bisa dilakukan sampai dengan 30 September 2023.

Persandingan realisasi PPS dan *Tax Amnesty* per wilayah

NO	WILAYAH	PESERTA PPS	REALISASI PPh Final PPS	PESERTA TA	UANG TEBUSAN TA
1	DKI JAKARTA	71.070	Rp 25,36 T	260.000	Rp 61,48 T
2	JAWA NON JAKARTA	92.834	Rp 20,52 T	382.000	Rp 36 T
3	SUMATERA	43.322	Rp 8,87 T	174.000	Rp 10,15 T
4	KALIMANTAN	13.394	Rp 2,95 T	52.000	Rp 2,95 T
5	SULAWESI	13.151	Rp 1,92 T	46.900	Rp 1,76 T
6	BALI, NUSRA, MALUKU, PAPUA	14.147	Rp 1,39 T	56.500	Rp 2,21 T
	TOTAL	247.918	Rp61,01 T	971.400	Rp 114,55 T



Akhirnya, Menteri Keuangan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyukseskan PPS.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak, para anggota DPR (Dewan perwakilan Rakyat), asosiasi-asosiasi usaha, perbankan, seluruh Kementerian Keuangan, awak media, ILAP, petugas pajak, dan semua pihak yang mendukung PPS sehingga dapat terlaksana sesuai yang diharapkan,” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani kemudian mengingatkan bahwa setelah periode PPS ini berakhir, untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan, pengawasan dan penegakan hukum di DJP akan dilaksanakan dengan berdasarkan basis data yang lebih kuat. Diharapkan WP dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar.

“Program ini adalah yang terakhir, dengan demikian semua data yang diperoleh akan menjadi *database* DJP. Bukan dalam rangka memberikan ketakutan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita akan menjalankan Undang-Undang secara konsisten, secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk gotong royong membangun Indonesia,” katanya.

Wajib pajak dapat membarui informasi seputar perpajakan di laman landas www.pajak.go.id.

#PajakKuatIndonesiaMaju

Narahubung Media: _____

Neilmaldrin Noor
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak

☎ 021 – 5250208
✉ humas@pajak.go.id